

FENOMENA KEMISKINAN STRUKTURAL DAN RESPONS KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH SUBANG UTARA

Diah Andani^{1*}, Dini Rizki Fitriani², Arisriyanto²

^{1,2} Universitas Subang, Subang, Indonesia

³ Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

*Korespondensi : diahandani@unsub.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemiskinan struktural di wilayah Subang Utara serta menganalisis sejauh mana kebijakan publik daerah mampu merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Subang Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya keberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah daerah cenderung bersifat kuratif dan belum sepenuhnya menysasar akar struktural kemiskinan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data yang akurat, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan..

Kata Kunci : Kemiskinan Struktural, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Subang Utara, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Structural poverty is a form of poverty caused by systemic inequality in access to resources, public services, and socio-economic opportunities. This study aims to examine the phenomenon of structural poverty in the northern region of Subang Regency and to analyze the extent to which local public policies respond to these issues. The research uses a qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that poverty in North Subang is not merely driven by individual economic factors but is deeply rooted in poor infrastructure, limited access to education and healthcare, and the weak empowerment of local communities. The existing policies tend to be curative rather than transformative, failing to address the structural roots of poverty. A more participatory, data-driven, and empowerment-oriented policy approach is needed to reduce poverty in a sustainable manner.

Keywords : *Structural Poverty, Public Policy, Public Administration, North Subang, Community Empowerment.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh pendapatan rendah, tetapi juga oleh ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya dan layanan dasar secara adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, kemiskinan struktural menjadi tantangan yang kompleks, khususnya di wilayah dengan ketimpangan geografis, sosial, dan ekonomi yang tinggi seperti Kabupaten Subang bagian utara.

Wilayah Subang Utara meliputi beberapa kecamatan seperti Pusakanagara, Pusakajaya, Legonkulon, Blanakan, dan Ciasem. Kawasan ini dikenal sebagai daerah pesisir dan pertanian yang belum berkembang secara optimal dibandingkan wilayah tengah dan selatan Subang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Subang tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Subang berada pada kisaran 9,47%, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat yang berada di angka 7,62%. Meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kesenjangan antar wilayah masih cukup tajam, terutama jika dilihat dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur.

Beberapa wilayah di Subang Utara menghadapi keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur jalan, konektivitas digital, serta kurangnya investasi ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang pada tahun 2023 berada di angka 68,90, masih tergolong sedang, dengan komponen pendidikan dan daya beli sebagai penopang terlemah. Rendahnya partisipasi sekolah lanjutan dan

tingginya angka putus sekolah di desa-desa pesisir menjadi gambaran nyata bahwa kemiskinan bukan hanya karena minimnya penghasilan, tetapi juga karena ketimpangan sistemik dalam distribusi peluang dan pelayanan publik.

Kebijakan publik yang diterapkan sejauh ini, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), PKH, BPNT, serta program Dana Desa, lebih bersifat kuratif dan bantuan langsung ketimbang solutif dan transformatif. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti UMKM, pelatihan kerja, dan koperasi, masih belum menjangkau kelompok marginal secara merata, terutama perempuan kepala keluarga, buruh tani, dan nelayan kecil. Akibatnya, banyak rumah tangga miskin tetap bertahan dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Situasi ini mencerminkan bahwa kemiskinan di Subang Utara bersifat struktural, yakni terbangun karena ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik, yang dipengaruhi oleh sejarah pembangunan, kelembagaan lokal, serta keberpihakan kebijakan. Dalam konteks administrasi publik, permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, serta lemahnya kapasitas birokrasi dalam melakukan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

Dengan demikian, kajian mengenai fenomena kemiskinan struktural dan respons kebijakan publik di wilayah Subang Utara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana pola kemiskinan tersebut terbentuk dan dipertahankan oleh sistem, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah dalam merespons fenomena tersebut.

Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena kemiskinan struktural serta respons kebijakan publik secara mendalam dalam konteks wilayah Subang Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara lebih komprehensif, serta menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata.

Lokasi penelitian difokuskan pada tiga kecamatan di wilayah Subang Utara, yaitu Kecamatan Pusakanagara, Legonkulon, dan Blanakan. Ketiga wilayah ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik yang mencerminkan ketimpangan pembangunan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang kerja yang layak. Selain itu, wilayah ini juga mencerminkan wajah kemiskinan yang bersifat struktural, di mana kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem dan kebijakan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan utama meliputi masyarakat miskin (seperti buruh tani, nelayan kecil, dan perempuan kepala keluarga), aparatur

pemerintah desa dan kecamatan, pejabat dari Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Subang, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat atau komunitas lokal yang aktif dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi riil masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mereka. Peneliti turut menelaah berbagai dokumen seperti RPJMD, laporan program penanggulangan kemiskinan, serta data statistik dari BPS sebagai bagian dari studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara tematik, dimulai dengan proses reduksi data untuk memilah informasi yang relevan berdasarkan tema-tema utama seperti pola kemiskinan, bentuk intervensi kebijakan, dan dampak sosial ekonomi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hubungan antar temuan, serta diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkan pada teori-teori administrasi publik dan kebijakan sosial. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara temuan lapangan dengan kerangka teoritik yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Informasi yang diperoleh dari berbagai informan akan dibandingkan dan diverifikasi melalui teknik berbeda seperti wawancara dan observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi ulang atau member checking kepada beberapa informan kunci guna memastikan bahwa interpretasi yang dibuat sesuai dengan kondisi dan pandangan mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Subang Utara tidak dapat dijelaskan hanya melalui indikator pendapatan semata, melainkan merupakan kondisi yang terbentuk dari akumulasi faktor historis, struktural, dan kebijakan yang tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Subang tercatat sebesar 9,47%, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat sebesar 7,62%. Sebagian besar penduduk miskin di Subang terkonsentrasi di wilayah utara, khususnya di Kecamatan Blanakan, Pusakanagara, dan Legonkulon yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

Dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat miskin di Kecamatan Blanakan, ditemukan bahwa sebagian besar kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor buruh tani musiman, nelayan tradisional, dan pekerjaan informal seperti buruh pabrik lepas harian. Mereka tidak memiliki jaminan pendapatan tetap, tidak terhubung dengan sistem jaminan sosial secara memadai, dan sebagian besar tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Seorang informan perempuan kepala keluarga menyampaikan bahwa ia harus bekerja sebagai buruh pengupas kerang dengan penghasilan kurang dari Rp25.000 per hari, sementara ia harus menanggung dua anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan air bersih di desa-desa pesisir masih jauh dari memadai. Di Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, misalnya, akses jalan ke pusat layanan kesehatan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor atau

kendaraan kecil, itupun dalam kondisi yang rusak dan berlubang. Selain itu, jaringan internet yang lemah menyebabkan anak-anak kesulitan mengakses pembelajaran daring, terutama selama masa pandemi, yang turut memperlebar kesenjangan pendidikan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah sebenarnya telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan aparatur desa, implementasi program-program tersebut kerap terkendala pada masalah data yang tidak mutakhir, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Di Desa Karanganyar, misalnya, terdapat beberapa warga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sementara warga yang secara ekonomi lebih mampu justru menerima bantuan.

Ketimpangan kebijakan juga tampak dalam orientasi pembangunan yang masih berfokus pada wilayah tengah dan selatan Subang, seperti pengembangan kawasan industri dan wisata. Sementara wilayah utara yang memiliki potensi pertanian dan kelautan belum sepenuhnya tersentuh intervensi kebijakan berbasis potensi lokal. Hasil wawancara dengan perwakilan Bappeda menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan rendahnya kualitas data spasial menyebabkan program pembangunan tidak sepenuhnya menjangkau wilayah marginal.

Dari perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan lemahnya proses formulasi dan implementasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan cenderung elitis dan teknokratis, tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat miskin itu sendiri. Hal ini menguatkan teori-teori kritis dalam administrasi publik yang menyatakan bahwa kemiskinan struktural tidak hanya merupakan kegagalan ekonomi, melainkan juga kegagalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang bersifat karitatif (seperti bantuan sosial tunai) hanya dapat menjadi solusi jangka pendek. Untuk merespons kemiskinan struktural secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih transformatif dan partisipatif, seperti pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, reformulasi data penerima manfaat berbasis partisipasi warga, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan yang inklusif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di wilayah Subang Utara bersifat struktural, yaitu bukan semata akibat rendahnya pendapatan, melainkan terbentuk dari ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya peluang kerja yang layak, serta lemahnya keberdayaan masyarakat menjadi penyebab utama mengapa kemiskinan di wilayah ini berlangsung secara berkelanjutan.

Kebijakan publik yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang cenderung bersifat

kuratif dan jangka pendek, seperti bantuan sosial langsung, tanpa menyentuh akar persoalan kemiskinan yang bersifat struktural. Selain itu, lemahnya validasi data penerima manfaat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dan tidak meratanya distribusi pembangunan antarwilayah turut memperburuk efektivitas kebijakan.

Untuk mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dari pola karitatif menjadi pendekatan transformatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, reformulasi kebijakan berbasis data yang akurat dan partisipatif, serta pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi lokal. Upaya ini memerlukan komitmen politik yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2023). *Kabupaten Subang dalam Angka 2023*. Subang: BPS Subang.
- Dwidjowijoto, R. (2007). *Membangun Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Efisien*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Mubyarto. (1998). *Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: LP3ES.
- Putra, R. A., & Nurmandi, A. (2020). Local government strategies in poverty alleviation through community empowerment. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 23–38. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.710>
- Prasetyo, A. (2019). Kemiskinan struktural dan keberpihakan kebijakan pembangunan di daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 89–102. <https://doi.org/10.22146/jsp.43771>
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Strategi Penanggulangan*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democratic development. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121336>